

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP
KELUARGA SANGAT MISKIN (KSM) PENERIMA BANTUAN
(Studi di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur)**

Pelipus Pekuwali, Endang Indartuti, Indah Murti

pelipus@gmail.com, indartuti65@gmail.com, indahmurti88@yahoo.co.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

This study aims to describe the implementation of Family Hope Program (PKH) in Rindi District, East Sumba Regency. This research uses qualitative descriptive method type. Data collection techniques used in the form of interviews to get a deep data from the sources. And Techniques The collection of data from existing sources is through records, archives, and documents, textbooks, existing both in the institution related to PKH and the libraries that deal with the research problems discussed. Informant research that includes the implementers, target groups and public figures in general. The results of this study show that PKH Implementation in Rindi Sub-district of East Sumba Regency has many obstacles and has not been implemented well, socialization and information distribution about PKH has not been fully known by the figures and society in general except the executing party and the target group, , And there is no clear SOP on PKH in Rindi District.

Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini menggunakan tipe metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan berupa teknik wawancara untuk memperoleh data yang mendalam dari narasumber. dan Teknik Pengumpulan data dari sumber yang telah ada yaitu melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen, buku teks, yang ada baik pada instansi terkait dengan PKH maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang di bahas. Informan penelitian yang meliputi pihak pelaksana, kelompok sasaran dan tokoh masyarakat pada umumnya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi PKH di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur banyak mengalami kendala dan belum di Implementasikan dengan baik, sosialisasi dan penyaluran informasinya tentang PKH belum menyeluruh diketahui oleh tokoh dan masyarakat pada umumnya kecuali pihak pelaksana dan kelompok sasaran, masih kekurangan tenaga pendamping, dan belum adanya SOP yang jelas tentang PKH di Kecamatan Rindi.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendahuluan

BPS Tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 12,49 %. Pada periode tahun 1996- 1998 angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan tajam, di mana angka kemiskinan di perkotaan naik menjadi 62,72% dan angka kemiskinan di pedesaan mencapai angka 61,1%. Kondisi ini hampir merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia per Maret 2014 menurut BPS adalah sebanyak 28.280.010 jiwa tersebar di kota sebanyak 10.507.200 jiwa dan di desa 10.507.200 jiwa dan di desa 17.772.81 jiwa. persentase penduduk miskin sebanyak 11,25 % dengan persebaran 8,34 persen di perkotaan 14,17 di desa.

Kemiskinan masalah publik yang kompleks dan bersifat multi dimensi. Sebagaimana pendapat Wrihatnolo (2002:121) yang menyatakan bahwa multidimensional sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan berbagai faktor seperti aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan global, Kemiskinan juga berimplikasi pada pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah Negara. Suharto (2010:142-143) menyatakan bahwa persoalan kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan masyarakat menyeluruh. Banyak studi yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan muara dari masalah- masalah sosial lainnya seperti; anak jalanan, pekerja anak, kekerasan rumah tangga, kebodohan, pengangguran dan bahkan kerawanan sosial.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi wakil Presiden Republik Indonesia, pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan.

Pertama, adalah kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kebijakan ini merupakan program- program yang bersifat pemenuhan hak

dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh keluarga sangat miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH). *Kedua*, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Implementasi PKH di kabupaten Sumba Timur berjalan sejak tahun 2012 Tingkat kehidupan RumahTangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 2720 KK dengan tingkat kemiskinan sebanyak 32,42% (74.000 Jiwa) Jumlah Penduduk yang mendiami Kabupaten sumba timur tersebut sebanyak 231,392 Jiwa (2011) dengan Kepadatan Penduduk 33 Jiwa/Km² yang terdiri dari 22 kecamatan yaitu Kecamatan Haharu, Kahunga Eti, Kambata Mapambuhang, Kambera, Kanatang, Karera, Katala Hammu, Kota Waingapu, Lewa, Lewa Tidahu, Mahu, Matawai Lapau, Ngadu Ngala, Nngga Oriangu, Paberiwai, Pahunga Lodu, Pandawai, Pinu Pahar, Rindi, Tambudung, Umalulu, Wulla Waijelu. Adapun pelaksanaan PKH di Kabupaten Sumba Timur dari Tahun ke Tahun yaitu: Tahun 2012 Kabupaten Sumba Timur masuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 66A/LJS/04/2012 Tanggal 2 April 2012 dengan sasaran pada 12 Kecamatan 76 desa dan 16 kelurahan dari 22 Kecamatan 156 desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Timur.

Tahun 2014 Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor :161/LJS/12/2013 ditetapkan kembali 10 Kecamatan dengan 64 desa sebagai Kecamatan Pengembangan PKH di Kabupaten palaksana PKH tahun 2014, dengan demikian 22 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur telah menjadi peserta PKH Tahun 2015 Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial N0.22/LJS/06/2015 tentang penetapan lokasi penambahan kepesertaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) pada kabupaten/kota pelaksana PKH Tahun 2015, Kabupaten Sumba Timur mendapat penambahan peserta PKH sebanyak 2.893 KSM yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan dan

setelah dilakukan validasi, KSM yang masih memenuhi syarat (*Eligible*) sebanyak 2.623 KSM yang tidak memenuhi syarat (*non eligible*) sebanyak 270 KSM Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial N0.22/LJS/06/2015 tentang penetapan lokasi penambahan kepesertaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) pada kabupaten/kota pelaksana PKH Tahun 2015, Kabupaten Sumba Timur mendapat penambahan peserta PKH sebanyak 2.893 KSM yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan dan setelah dilakukan validasi, KSM yang masih memenuhi syarat (*Eligible*) sebanyak 2.623 KSM yang tidak memenuhi syarat (*non eligible*) sebanyak 270 KSM. Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya implementasi PKH di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2012 – 2015 yang meliputi pelaksanaan kegiatan PKH, permasalahan, dan faktor pendukung terhadap penerima bantuan.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif . tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena tertentu sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai fenomena dari gambaran tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dikecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur. pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada kondisi daerah tersebut termasuk wilayah yang jumlah penduduk miskinnya tinggi dan juga banyak keluarga yang menerima program keluarga harapan (PKH) dikecamatan Rindi. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data dalam kategori, mnjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang sudah di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

Hasil dan Pembahasan

Program keluarga harapan adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), jika mereka memenuhi prasyarat RSTM yang ditetapkan. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyarat masyarakat/ keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksa kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, dirapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Sasaran penerima PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan PKH adalah ibu dan wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang berangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan).

Dalam implementasinya, PKH dilakukan dalam beberapa tahap yang terus berkesinambungan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan program PKH tersebut yang telah diputuskan pemerintah. Tahap dalam pelaksanaan PKH meliputi : penetapan sasaran, validasi, pembayaran pertama, pemuktahiran data, verivikasi, pembayaran tahap selanjutnya, dan transformasi (resentivikasi, transisi, dan graduasi).

Implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Rindi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh indivudi-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikain perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.komunikasi dalam organisasi

merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Agar implementasi berjalan dengan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi dan bagaimana akuratnya komunikasi di kirim dan disampaikan. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya, komponen sumber daya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan ,serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, dan sarana dan prasarana. Sumber daya lain yang penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staff maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi dan bagaimana akuratnya komunikasi di kirim dan disampaikan. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya, komponen sumber daya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan ,serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, dan sarana dan

prasarana. Sumber daya lain yang penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staff maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang di perlukan untuk melaksanakan keijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa vasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Membahas pelaksana suatu kebijakan, tidak perna terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensialmaupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami, seberapa jauh rentan kendali antara puncak pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh semakin rumit, birokratis dan lamban untuk merespon perkembangan program.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur dapat di ambil kesimpulan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2012 sampai sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rindi menunjukkan kurang berjalan dengan baik terlihat masih adanya masyarakat yang terlihat masih ada peserta PKH yang mendapatkan informasi tentang PKH dari tetangga/masyarakat lain bukan dari pihak kecamatan dan pendamping. Dan juga penyaluran informasi tidak melibatkan atau melewati tingkatan-tingkatan birokrasi seperti dari Kecamatan terus kedesa dan selanjutnya kepenerima PKH karna pihak kecamatan menginginkan penyaluran informasi secara langsung kepada penerima PKH sehingga informasi yang

disampaikan lebih real, akurat dan efektif, kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana lebih jelas dan tidak membingungkan. Sosialisasi pihak Kecamatan kepada masyarakat yang mengandalkan penyebaran informasi dari pihak Kecamatan dan Pendamping PKH merupakan titik kelemahan program.

- b. Sumber Daya di Kecamatan Rindi menunjukkan bahwa sudah mampu mendukung keberhasilan Program Keluarga Harapan karna implement PKH rata-rata lulusan sarjana dari berbagai jurusan , membuat keberagaman pemahaman dan sudut pandangan tentang tujuan dan sasaran PKH. Dan hanya saja pihak kecamatan tidak bisa maksimal karna keterbatasan sumber daya pendamping yang hanya satu orang, selain itu ketersediaan Dana yang mendukung keberhasilan PKH sudah cukup.
- c. Terkait komitmen dan kejujuran pelaksanaan PKH di Kecamatan Rindi cukup baik karna ditemukan fakta dilapangan pernyataan pihak pelaksana dan penerima sudah sesuai ketentuan yang berlaku pendistribusian PKH dalam setahun empat kali, bantuan PKH juga selalu dibagikan tiap tiga bulan. Dengan maksimum bantuan menurut buku paduan umm PKH tahun 2013 yaitu 2.800.000. Namun pada tahun 2015 sesuai dengan keputusan Meteri Sisoal Republik Indonesia No.24/HUK/2015 bantuan yang di terima peserta PKH maksimum-nya Rp. 3.700.000 per-KSM/tahun. Untuk tingkat demokrasiya masih kurang karna jarang pihak Kecamatan mengajak peserta PKH untuk bermusyawarah.
- d. Struktur Birokrasi dalam Impelmentasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rindi menunjukkan SOP kurang jelas terkait pelaksanaan PKH ketidak jelasan ini membuat pihak kecamatan kesulitan memahami tupoksinya dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Rindi, dan rentan kendali hubungan tingkat atas dan tingkaat bawah berjalan baik dan kondusif.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ayu virgoreta. Dyah. (2015). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban*, 2, No.12, 1-6.
- Eka Suwinta, Antriya. (2016). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*, 1, No.1, 0-216.
- Fahrudin, Adi. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Rafika
- Hikmat, Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora Utama Press.
- Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Khodidiziah, (2013). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mananggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, 2, No.4, 709-714.
- Moleong, lexi j. (2006). *Metode Penelitin Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, (1998). *Menanggulangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Adytia Media
- Nasir, Mohamad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Naska Pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH). (2013). Kementrian Sosial RI
- Nugroho. Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta.PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

- Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media,
- Utomo, Dedy. (2013). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas hidup Rumah Tangga Miskin studi pada unit pelaksana program keluarga harapan kecamatan purwosari, kabupaten Kediri*, 2, No.1, 29-34
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Wrihatnolo, Randy R. (2002). *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Paduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.